

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat- Nya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	5
D. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	5
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	9
F. LANDASAN HUKUM.....	11
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	14
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029).....	22
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	48
B. INOVASI TAHUN 2024.....	80
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025.....	81
BAB IV PENUTUP	82
A. SIMPULAN.....	82
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026.....	84
LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahunan adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahunan secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang trantibumlinmas, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
- b. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun berikutnya.

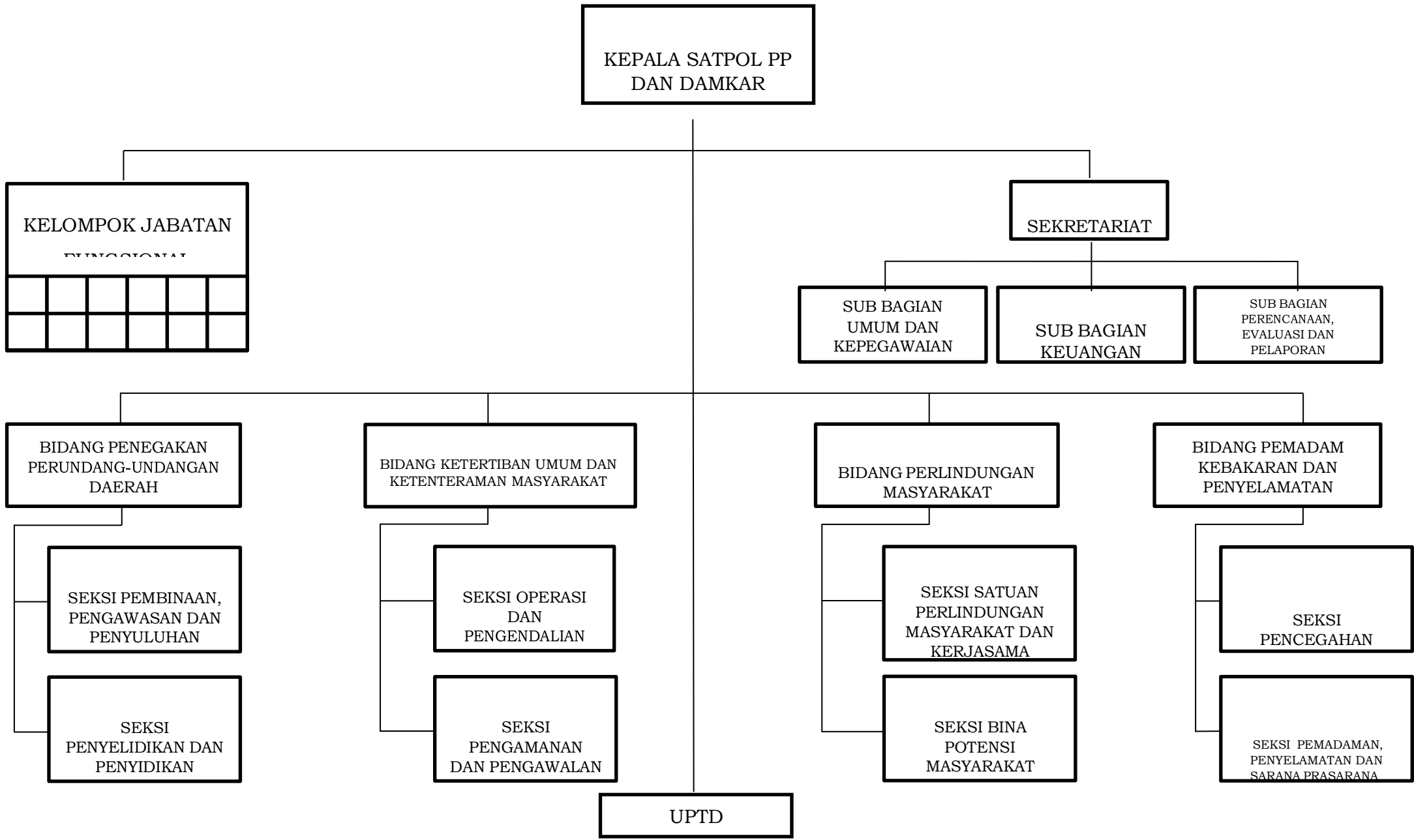
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan pada pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas dan Kerjasama
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan /atau aparatur lainnya; dan
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 107 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1

Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
1.	KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR	1	1	0
2.	Sekretaris	1	1	0
3.	Kasubag Keuangan	1	1	0
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
5.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
6.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
8.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
9.	Kasubag Umum dan kepegawaian	1	1	0
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	-3
11.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
12.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	1	0
13.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	1	1	0
14.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	2
15.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
16.	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	5
17.	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	1	1	0
18.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	-2
19.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
20.	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	1	1	0
21.	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian	1	1	0
22.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
23.	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	1	0	-1
24.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
25.	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	5
26.	Kepala Seksi Pengamanan Dan Pengawalan	1	1	0
27.	Penelaah Teknis Kebijakan	11	0	-11
28.	Pengolah Data Dan Informasi	1	1	0
29.	Pengadministrasi Perkantoran	15	45	30
30.	Penata Layanan Operasional	0	1	1
31.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	0

32.	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	1	1	0
33.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
34.	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
35.	Pengadministrasi Perkantoran	1	8	7
36.	Penata Layanan Operasional	0	1	1
37.	Kepala Seksi Pencegahan	1	1	0
38.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
38.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
40.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	1	0
41.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kerjasama	1	0	-1
42.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
43.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
44.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1	1	0
45.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	-2
56.	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
47.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	81	11	-70
48.	JF Pemadam Kebakaran Terampil	48	0	-48
49.	JF Pemadam Kebakaran Mahir	24	0	-24
50.	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	5	0	-5
51.	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	50	0	-50
52.	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	22	0	-22
53.	JF Analis Kebakaran Ahli Madya	1	0	-1
54.	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
55.	JF Pranata Komputer Pelaksana	1	0	-1
56.	JF Polisi Pamong Praja Pemula	30	0	-30
57.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	30	6	-24
58.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	30	0	-30
59.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	-1
	TOTAL	397	107	-290

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2

Pangkat/Golongan Ruang Pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama/IV-d	
2.	Pembina Utama Muda/IV-c	1

3.	Pembina Tk.I/IV-b	1
4.	Pembina/IV-a	2
5.	Penata Tk.I/III-d	5
6.	Penata/III-c	7
7.	Penata Muda Tk.I/III-b	13
8.	Penata Muda/III-a	24
9.	Pengatur Tk 1/II-d	16
10.	Pengatur/II-c	8
11.	Pengatur Muda tk 1/II-b	7
12.	Juru tk 1 /Id	7
	Jumlah	104

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 3	
2.	Strata 2	3
3.	Strata 1/Sederajad	25
4.	Diploma	2
5.	SMA/Sederajad	68
6.	SMP/Sederajad	
7.	SD/Sederajad	1
	Jumlah	104

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	98
2.	Perempuan	6
	Jumlah	104

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahunan n		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Peralatan tanah dan mesin	7,554,273,756	204,614,500		7,758,888,256
2.	Gedung dan Bangunan	610,584,000	9,000,900		619,584,900
3.	Jalan, Irigasi dan jembatan	583,197,933	-		583,197,933
4.	Aset Tetap lainnya	221,808,000	-		221,808,000
	Jumlah	8,969,863,689	213,615,400	-	9,183,479,089

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 16.234.359.137 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Tahun 2025	Tahun 2026 (n-1)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,788,510,922	10,796,139,339
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,639,671,515	2,681,377,383
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	806,176,700	520,781,844

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau

perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan periode 2024 s.d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan
2. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum
3. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
4. Keberadaan Sosial Media menyebabkan maraknya penyebaran isu-isu/hoax
5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing.

Perumusan Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024 s.d 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2025. Isu Strategis yang ditangani

pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan;
2. Banyaknya gangguan pengamen, pengemis, manusia silver dan badut
3. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum;
4. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3);
5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing.
6. Banyaknya kejadian kebakaran di wilayah yang jauh dari jangkauan Mako Satpol PP dan Damkar

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.204/2024 Tanggal 1 Februari 2024.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dengan Tujuan RPD Magetan Tahun 2024-2026

Tujuan ke 1. RPD Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi
Sasaran ke 2 Meningkatnya realisasi investasi kabupaten Magetan Indikator sasaran : Meningkatnya realisasi penanaman modal
Strategi RPD: 1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
Arah Kebijakan RPD: Meningkatkan branding dan pemasaran produk dan potensi Kabupaten Magetan melalui pelaksanaan dan keikutsertaan event-event bertaraf nasional maupun internasional
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Tujuan OPD: Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban daerah Indikator Tujuan : Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas
Sasaran OPD: 1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator sasaran : Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran Indikator Sasaran : Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit 3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp

dan Damkar Indikator sasaran : a. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar b. Nilai IKM Satpol PP dan Damkar

1. Tujuan, sasaran, indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan periode 2025 . Tujuan dan Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
 Tujuan, sasaran, indikator Dan Target Kinerja
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
 Tahun 2024-2026

No	Tujuan	3	Sasaran	5	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah				Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas	90%	90%	90%
		1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	80%	80%	80%
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	1.3.1	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	92,78	92,79	92,80
				1.3.2	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	80	80,1	80,2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Melakukan penindakan terhadap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran perda/perkada sesuai dengan ketentuan hukum, Memberikan layanan pengaduan masyarakat yang responsif, Menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat umum maupun pelaku pelanggaran Perda/Perkada agar tidak melakukan pelanggaran	Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran perda/perkada, Membangun fasilitas call center (pelayanan aduan masyarakat), Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perda/perkada serta memberikan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran perda / perkada
		Meningkatkan intensitas operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda/Perkada , Meningkatkan kewaspadaan petugas keamanan terhadap potensi gangguan keamanan lingkungan,	Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Perda/Perkada secara berkala, baik rutin maupun insidental , Menempatkan tenaga pengamanan pada area Kantor pusat pemerintahan selama 24jam,
		Meningkatkan kualitas tenaga keamanan dan pengawalan bagi bupati/wakil bupati, tamu VIP/VVIP, acara-acara penting nasional/daerah dan aset daerah	Menyelenggarakan pelatihan, penyediaan sarana prasarana dan penambahan tenaga pengedali keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Memperluas jangkauan tim pemadam kebakaran agar dapat mempercepat proses pemadaman api, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, Meningkatkan	Membangun fasilitas dan mengadakan sarana prasarana penunjang pemadaman kebakaran di beberapa wilayah rawan kebakaran, Mengadakan sosialisasi pemadaman api kepada elemen

		kuantitas dan kualitas tenaga pemadam kebakaran , Meningkatkan kewaspadaan petugas pemadam kebakaran terhadap potensi kebakaran	masyarakat dan pembentukan balakar, Mengadakan rekrutmen dan pelatihan anggota pemadam kebakaran , Mengkondisikan petugas jaga 24 jam untuk mengantisipasi kejadian kebakaran
--	--	---	---

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Indikator Kinerja Utama
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
 Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
dengan Visi dan Misi Bupati Magetan
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD) ke- 7 Membangun Kehidupan masyarakat yang guyup rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Tujuan (RPJMD) Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis
Sasaran (RPJMD) Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial
Tujuan (Renstra) Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah Indikator: Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas
Sasaran (Renstra) ke 1-. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Indikator: Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum Sasaran (Renstra) ke 2-. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran Indikator: (1) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran (2) Persentase Laporan Kejadian Kebakaran yang Ditindaklanjuti dalam Kurun Waktu 15 Menit

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah		Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas	%	97.85	97.85	97.86	97.90	97.95	98
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	(1) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran (2) Persentase Laporan Kejadian Kebakaran yang Ditindaklanjuti dalam Kurun Waktu 15 Menit	%	100 ; 82	100 ; 83	100 ; 83,5	100 ; 84	100 ; 84,5	100 ; 85
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	(1) Nilai SAKIP (2) Nilai IKM	%	92,79 80,65	92,80 80,70	93 80,80	93,20 80,90	93,50 80,95	93,60 81

Sumber: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan periode 2025 – 2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun **2025 – 2029**

VISI : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan			
MISI ke- : Membangun Kehidupan masyarakat yang guyup rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah	1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan layanan pengaduan masyarakat yang responsif • Meningkatkan intensitas operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda/Perkada • Meningkatkan kewaspadaan petugas keamanan terhadap potensi gangguan keamanan lingkungan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran perda/perkada, Membangun fasilitas call center (pelayanan aduan masyarakat), 2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perda/perkada serta memberikan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran perda / perkada. 3. Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Perda/Perkada secara berkala, baik rutin maupun insidental 4. Menempatkan tenaga pengamanan pada area Kantor pusat pemerintahan selama 24jam, 5. Menyelenggarakan pelatihan, penyediaan sarana prasarana dan penambahan tenaga

			pedagali keamanan dan kenyamanan lingkungan
	2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani laporan non kebakaran / penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. .Membangun fasilitas dan mengadakan sarana prasarana penunjang pemadaman kebakaran di beberapa wilayah rawan kebakaran, 2. Mengadakan sosialisasi pemadaman api kepada elemen masyarakat dan pembentukan balakar 3. Mengadakan pelatihan anggota pemadam kebakaran 4. Mengkondisikan petugas jaga 24 jam untuk mengantisipasi kejadian kebakaran

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025- 2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

		Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan ; - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja; - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja; - Bobot 25 komponen evaluasi. <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level 	Inspektorat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

			<p>secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);</p> <p>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</p> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika; 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap; 		
--	--	--	--	--	--

			<p>3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan;</p> <p>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya.</p> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP; 2. Keselarasan dokumen perencanaan; 3. Ketercapaian Kinerja; 4. LHE ditindaklanjuti; 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanj LHE. <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan periode 2025 – 2029

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berikut Rencana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	100
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65

Sumber: Rencana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	10,866,582,917
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	18	27,733,800
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	14,926,900
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	12,806,900
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah ; Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah	dokumen	12	9,893,671,467
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	100	9,881,831,667
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	11,839,800
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	2	129,450,000
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	129,450,000

10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	301,522,550
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	88,128,700
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	36,500,000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,220,850
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12,555,000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	8,868,000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	95,250,000
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	bulan	12	238,513,100
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	56,010,700
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15,000,000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	167,502,400
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	275,692,000
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	53,192,000

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	222,500,000
24	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	%	97	4,686,328,840
25	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	kasus	875	2,993,937,130
26	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	673,257,600
27	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100	429,507,050
28	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	500	1,686,042,980
29	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	370	205,129,500
30	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan	laporan	71	1,692,391,710

	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota			
31	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	617,965,000
32	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	20	961,685,760
33	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	50	112,740,950
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	80	3,395,750,950
35	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	laporan	80	3,382,978,350
36	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	80	591,715,550
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	2,791,262,800

38	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	12,772,600
39	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	12,772,600
TOTAL					18,948,662,707

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 21 bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	100
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65

Sumber: Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat.
2. Terjadi perubahan anggaran

Tabel 2.12

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	100
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65

Sumber: Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan:

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	10,788,510,922
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	18	19,969,100
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	11,598,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	8,371,100
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah ; Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah	dokumen	12	9,867,427,822
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	9,860,483,422
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,944,400
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	2	129,450,000

9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	129,450,000
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	251,843,250
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	104,202,850
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,612,100
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	64,605,800
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	11,723,750
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	8,605,500
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	32,093,250
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	bulan	12	269,930,200
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	54,310,700
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	19,300,000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	196,319,500
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	249,890,550
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	45,384,550

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	204,506,000
24	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	%	97	4,639,671,515
25	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	kasus	875	2,990,313,355
26	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	388,492,600
27	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100	377,108,750
28	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	500	2,064,702,080
29	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Laporan	370	160,009,925

	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
30	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	laporan	71	1,649,358,160
31	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	601,743,000
32	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	20	979,687,660
33	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	50	67,927,500
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	80	806,176,700
35	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	laporan	80	794,808,900
36	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	80	428,182,450
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah	Unit	10	366,626,450

		dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
38	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	11,367,800
39	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	11,367,800
TOTAL					16,234,359,137

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 21 bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan** Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	100
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65

Sumber: Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator

kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 s.d 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan tahun n menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Berhasil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Gakda dan Trantibum
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	82%	86%	105%	Sangat Berhasil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Damkar

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	92.79	94.54	102%	Sangat Berhasil	LHE Inspektorat
	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	80.65	88.99	110%	Sangat Berhasil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama. Hasil capaian kinerja Tahun 2025 sudah mencapai target dengan Rata-Rata capaian kinerja dari 4 indikator tersebut adalah 104%.

a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 :

”Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat”

Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diukur dengan indikator, yakni : **“Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum ”**

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%

Tabel 3.3

Jumlah tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum

NO	KATEGORI PELANGGARAN	JUMLAH LAPORAN YANG MASUK MELALUI MEDIA PELAPORAN ONLINE	JUMLAH LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE
1	PK5, warung meresahkan	3	3	

2	Reklame / baleho roboh	1	1	
3	Gangguan ODGJ	9	9	
4	Tower	1	1	
5	Rumah kost	1	1	
5	Gangguan kebisingan/lainnya	5	5	
	Total	20	20	100%

Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Yang Masuk Melalui Media Pelaporan Online}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{20} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan telah berhasil **mencapai target**.

- **Faktor Penunjang ketercapaian target adalah** tersedianya media yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan gangguan trantibum serta pelanggaran perda
- **Dampak dari tercapainya target ini adalah** masyarakat dapat merasa lebih percaya dan dapat mengandalkan Satpol PP dan Damkar apabila mendapati gangguan trantibum yang ada di lingkungan sekitarnya
 - Hambatan:

Masih ada laporan yang disampaikan langsung melalui telepon atau wa kepada personal, sehingga tidak terdokumentasi
 - Solusi:

Akan dilakukan sosialisasi lebih massive terkait tata cara pengaduan kepada masyarakat agar semua dapat melalui pengaduan online, dan untuk tahun 2026 akan dilakukan pendataan untuk laporan yang melalui telepon atau wa yang masuk kepada personil Satpol PP

b. Analisis capaian kinerja sasaran :
“Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran”

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran diukur dengan indikator, yakni: **“Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit ”**

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah 82%, Sedangkan realisasinya adalah 86%. Data jumlah peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Kejadian Kebakaran Yang Berhasil Ditangani Oleh Satpol PP Dan Damkar
Dalam 15 Menit

NO	JENIS KEJADIAN KEBAKARAN	LOKASI KEJADIAN	RESPON TIME			WAKTU SESUAI SPM
		KEC	LAPORAN MASUK	PENANGANAN	Response Time (wkt penanganan-lap masuk)	
1	3		4			
1	Rumah	Karangrejo	04:26	04:30	00:04	SESUAI
2	Mobil	Sidorejo	21:12	21:26	00:14	SESUAI
3	Rumah	Magetan	11:00	11:03	00:03	SESUAI
4	Rumah ODGJ	Sukomoro	10:34	10:49	00:15	SESUAI
5	Mobil Bak Terbuka	Magetan	14:55	15:02	00:07	SESUAI
6	Rumah	Plaosan	2:27	2:42	00:15	SESUAI
7	Rumah	Magetan	01:45	01:47	00:02	SESUAI
8	Kandang Ayam	Lembeyan	07:12	07:35	00:23	TIDAK SESUAI
9	Kandang Ayam	Sukomoro	03:53	04:05	00:12	SESUAI
10	Rumah	Sidorejo	00:27	00:35	00:08	SESUAI
11	Rumah	Magetan	7:05	7:10	00:05	SESUAI

12	Dinas Pendidikan	Magetan	08:26	08:31	00:05	SESUAI
13	Rumah	Parang	15:47	16:02	00:15	SESUAI
14	Rumah	Magetan	21:23	21:33	00:10	SESUAI
15	Rumah	Karas	09:49	10:04	00:15	SESUAI
16	Rumah	Karas	18:33	18:48	00:15	SESUAI
17	Kandang+ Dapur	Maospati	00:18	00:43	00:25	TIDAK SESUAI
18	Kebun Bambu	Nguntoronadi	22:08	22:33	00:25	TIDAK SESUAI
19	Kandang Ayam	Parang	01:07	01:40	00:33	TIDAK SESUAI
20	Rumah	Karas	22:16	22:30	00:14	SESUAI
21	Lahan Bambu	Kawedanan	17:13	17:34	00:21	TIDAK SESUAI
22	Rumah	Maospati	20:44	20:58	00:14	SESUAI
23	Kandang Ayam	Parang	12:28	12:42	00:14	SESUAI
24	Lahan Tebu	Sukomoro	21:19	21:29	00:10	SESUAI
25	Lahan Bambu	Karangrejo	18:13	18:28	00:15	SESUAI
26	Rumah	Ngariboyo	23:50	00:01	00:11	SESUAI
27	Lahan Bambu	Karangrejo	16:13	16:25	00:12	SESUAI
28	Warung	Magetan	18:16	18:25	00:09	SESUAI
29	Rumah	Kartoharjo	19:25	20:03	01:11	SESUAI
30	Lahan Bambu	Karas	14:02	14:12	00:10	SESUAI
31	Lahan Bambu	Takeran	18:12	18:35	00:23	TIDAK SESUAI
32	Rumah	Kawedanan	08:08	08:20	00:12	SESUAI
33	Lahan Bambu	Magetan	15:47	15:55	00:08	SESUAI
34	Lahan Bambu	Kawedanan	13:35	13:58	00:23	TIDAK SESUAI
35	Kandang	Sukomoro	17:43	17:51	00:08	SESUAI
36	Rumah	Panekan	14:45	14:57	00:12	SESUAI
37	Lahan Bambu	Karas	18:07	18:22	00:15	SESUAI
38	Kandang Kambing	Maospati	17:49	18:03	00:14	SESUAI
39	Lahan	Magetan	14:34	14:40	00:06	SESUAI
40	Lahan	Sukomoro	11:08	11:20	00:12	SESUAI

41	Kandang Sapi	Karangrejo	23:35	00:10		SESUAI
42	Lahan Tebu	Bendo	10:45	11:00	00:15	SESUAI
43	Lahan bambu	Kartoharjo	14:04	14:30	00:26	TIDAK SESUAI
44	Lahan Tebu	Takeran	20:15	20:30	00:15	SESUAI
45	Kandang Sapi	Maospati	23:12	23:20	00:08	SESUAI
46	Lahan Bambu	Maospati	10:36	10:50	00:14	SESUAI
47	Lahan Tebu	Bendo	18:29	18:40	00:11	SESUAI
48	Lahan Tebu	Magetan	22:24	22:29	00:05	SESUAI
49	Lahan Bambu	Takeran	17:40	18:03	00:23	TIDAK SESUAI
50	Kandang Sapi	Panekan	16:45	16:48	00:03	SESUAI
51	Gerobak Bakso	Magetan	07:34	07:40	00:06	SESUAI
52	Rumah	Magetan	10:32	10:37	00:05	SESUAI
53	Lahan Bambu	Magetan	14:09	14:15	00:06	SESUAI
54	Ruko	Panekan	00:10	00:10	00:00	SESUAI
55	Lahan	Magetan	10:23	10:33	00:10	SESUAI
56	Lahan Bambu	Magetan	17:27	17:31	00:04	SESUAI
57	Lahan Bambu	Ngariboyo	14:56	15:08	00:12	SESUAI
58	Lahan Bambu	Kawedanan	11:50	12:25	00:15	SESUAI
59	Tabung Gas	Kartoharjo	06:45	07:10	00:15	SESUAI
60	Diang	Panekan	02:42	02:50	00:08	SESUAI
61	Rumah	Plaosan	12:29	20:29	00:11	SESUAI
62	Kios Laundry	Panekan	08:46	08:56	00:10	SESUAI
63	Lahan Bambu	Barat	08:45	09:10	00:15	SESUAI
64	Tabung Gas	Ngariboyo	10:58	11:10	00:12	SESUAI
65	Kandang	Ngariboyo	09:49	09:58	00:09	SESUAI

Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit :

Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dalam 15 menit

_____ X 100%

Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2025

$$= 56 \quad \times 100\%$$

$$\frac{56}{65}$$
$$= 86 \%$$

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa total kejadian kebakaran sepanjang tahun 2025 adalah 65 kejadian, sedangkan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit sesuai SPM adalah 56 kejadian atau sekitar **86 %** maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Damkar **sudah berhasil mencapai target.**

- Faktor Penunjang ketercapaian target adalah
 - tersedianya media pelaporan yang memudahkan petugas maupun masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran dan mencari lokasi kejadiannya
 - lokasi kejadian kebakaran rata2 dekat dengan petugas sehingga masih dapat dijangkau sesuai respon time
- **Dampak dari tercapainya target adalah** terciptanya rasa aman bagi masyarakat sekitar dari dampak kejadian kebakaran
- Hambatan Pencapaian target
 - Lokasi kejadian kebakaran tidak dapat diprediksi dan seringkali susah untuk mencari lokasi kejadian dengan akurat
 - Untuk lokasi kejadian yang jauh dari mako damkar sangat sulit untuk mencapai SPM 15 menit
- Solusi kedepan

Meskipun target pada tahun 2025 ini tercapai namun belum mencapai target SPM yakni 100% response time 15 menit. Untuk itu Rencana aksi yang akan ditempuh sebagai solusi pencapaian target pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan posko pemadam kebakaran di Kecamatan Parang dan kawedanan serta mendorong pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa untuk setidaknya memiliki sarana prasarana pemadaman kebakaran ringan di wilayahnya masing- masing
2. Menambah metode pengaduan/laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang sebelumnya hanya via telepon, ditambah menggunakan WA dan instagram, sehingga dapat menunjukkan lokasi kejadian kebakaran dengan share lokasi
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat desa, kelurahan maupun dinas instansi tentang

pengetahuan cara pemadaman kebakaran dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran diwilayahnya. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan serta menanggulangi kebakaran ringan dan apabila terjadi kebakaran besar, masyarakat tahu kemana dan bagaimana cara melapor yang benar.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 :

“Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar”

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar diukur dengan 2 (DUA) indikator, yakni :

a. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan untuk nilai sakip adalah 92,78 %, sedangkan realisasinya adalah 92,78%. Data tersebut berasal dari LHE AKIP OPD tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	29.75	29.25
2	Pengukuran Kinerja	30	30.00	28.00
3	Pelaporan Kinerja	15	11.65	13.53
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	21.38	23.76
	Nilai Hasil evaluasi	100	92.78	94.54
	Tingkat AKuntabilitas Kinerja		AA	AA
	Interprestasi		Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Satpol PP dan DAMkar tahun 2025 adalah 94.54, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Damkar **sudah berhasil mencapai target.**

- **Faktor Penunjang ketercapaian target adalah** diadakannya banyak asistensi terkait SAKIP dari Pemerintah Daerah menyebabkan penyusunan dokumen SAKIP menjadi lebih baik
- **Dampak dari tercapainya target ini adalah** terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel di Satpol PP dan Damkar
- **Hambatan:**
Masih adanya data dukung kinerja yang belum terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat menghambat penyusunan laporan kinerja
- **Solusi:**
Akan dilakukan sosialisasi terkait SAKIP kepada masing-masing bidang pengampu dan meningkatkan kualitas dokumentasi data dukung pada tahun 2025

b. Nilai IKM Satpol PP dan Damkar

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan untuk nilai IKM adalah 80.65 , sedangkan realisasinya adalah 88.99. Data tersebut berasal dari aplikasi E SKM Satpol PP dan DAMkar tahun 2025 dengan total responden yang mengisi sebanyak 361 responden. maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Damkar **sudah berhasil mencapai target.**

- **Faktor Penunjang ketercapaian target adalah** adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam membuat aduan dan mendapatkan layanan dari Satpol PP dan Damkar
- **Dampak dari tercapainya target ini adalah** meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar
- **Hambatan:**
Masih kurangnya personil dan sarana prasarana pendukung untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat
- **Solusi:**
Akan dilakukan penambahan petugas maupun sarana prasarana pendukung pelayanan pada tahun 2026

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan tahun n menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							
	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%	4,639,671,515	3,886,228,667	84%	100	100	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,639,671,515	3,886,228,667	84%	100	100	100%
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas							
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	%	4,639,671,515	3,886,228,667	83.76%	97	100	103%
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2,990,313,355	2,878,159,495	96.25%			
	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	kasus				875	878	100%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		388,492,600	299,133,067	77.00%			

			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen				3	3	100%
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		377,108,750	373,783,820	99.12%			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang				100	100	100%
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		2,064,702,080	2,053,431,043	99.45%			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan				500	508	102%
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		160,009,925	151,811,565	94.88%			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Laporan				370	370	100%

			Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1,649,358,160	1,008,069,172	61.12%			
			Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	laporan				71	76	107%
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		601,743,000	496,645,650	82.53%			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan				1	6	600%
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		979,687,660	443,980,583	45.32%			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan				20	20	100%
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		67,927,500	67,442,939	99.29%			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan				50	50	100%

2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran								
	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit		%	806,176,700	654,503,162	81%	82%	86%	105%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			806,176,700	654,503,162	81%	82%	86%	105%
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan								
	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran								
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		794,808,900	645,773,362	81%			
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	laporan				80	65	81%
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		428182450	370417512	86.51%			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan				80	65	81%

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		366,626,450	275355850	75.11%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit				10	11	110%
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		11,367,800	8,729,800	77%			
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					30	30	100%
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		11,367,800	8,729,800	77%			
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang				30	30	
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar									
	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar				10,788,510,922	10,297,139,077	95%	92.79	94.54	102%
	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar							80.65	88.99	110%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,788,510,922	10,297,139,077	95%	80.65	88.99	110%

	Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Satpol PP dan Damkar									
	(1) Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (skor)			angka				80.65	88.99	110%
	(2) Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran (Persen)									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,969,100	19,685,000	99%			
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		dokumen				18	18	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11,598,000	11,448,000	99%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen				9	9	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,371,100	8,237,000	98%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen				9	9	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,867,427,822	9,472,855,115	96%			
		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah ; Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah		orang				1484	1484	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,860,483,422	9,466,216,115	96%			

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				100	107	107%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		6,944,400	6,639,000	96%			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen				12	12	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		129,450,000	122,287,035	94%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket				2	2	100%
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		129,450,000	122,287,035	94%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket				2	2	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		251,843,250	233,634,385	93%			
			Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan				12	12	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		104,202,850	96,623,736	93%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket				12	12	100%

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		30,612,100	28,589,675	93%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket				12	12	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		64,605,800	58,256,552	90%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket				12	12	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11,723,750	10,585,322	90%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket				12	12	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8,605,500	7,580,000	88%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				24	24	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		32,093,250	31,999,100	100%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				24	24	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		269,930,200	226,886,789	84%			
			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	12	100%

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		54,310,700	34,676,416	64%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12	12	100%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19,300,000	19,208,920	100%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				12	12	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		196,319,500	173,001,453	88%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12	12	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		249,890,550	221,790,753	89%			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan				12	12	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		45,384,550	31,717,380	70%			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				1	1	100%

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		204,506,000	190,073,373	93%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				27	27	100%

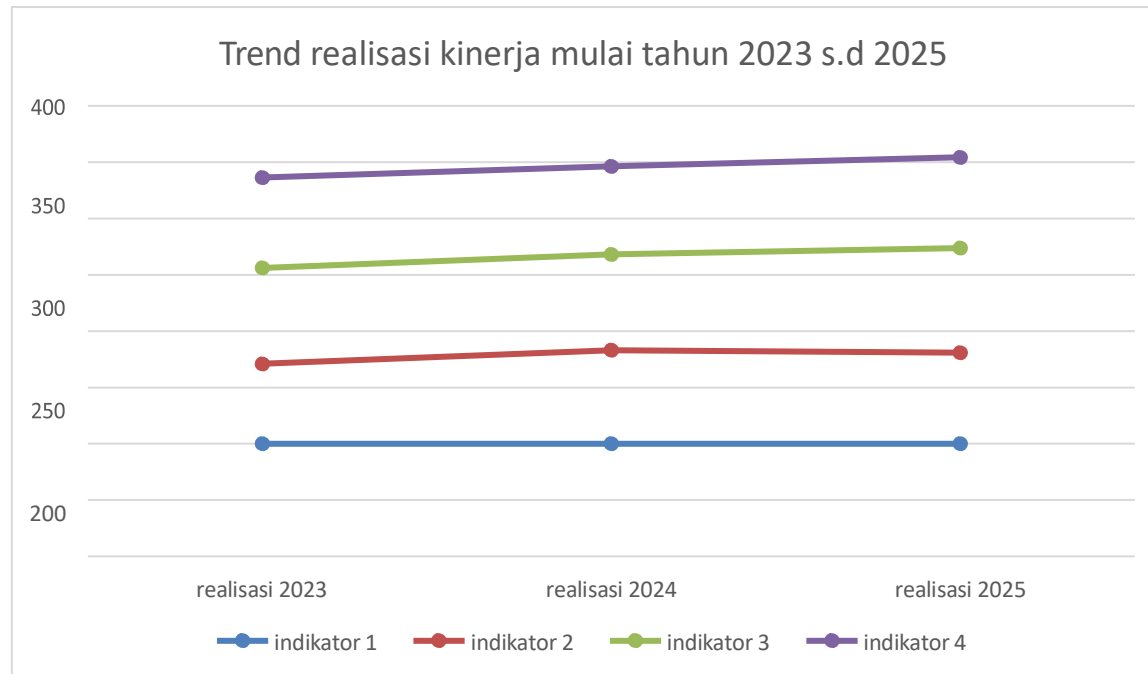
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024			2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	75	83	111	80	81	101%	82%	86%	105%
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	85.01	85.01	100%	92,78	92,78	100%	92.79	94.54	102%
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80	78.28	98%	80	80,62	100%	80.65	88.99	110%

Dapat dilihat pada table diatas bahwa capaian masing masing indikator kinerja pada tahun 2025 sudah 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian yang masih mengalami fluktuasi adalah pada indikator kinerja persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit. Jika disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut:



3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7

Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100%	100%
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	86	80%	108%
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	94.54	92.8	102%
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	88.99	80.2	111%

Pada table diatas dapat dilihat bahwa semua target indikator sudah mencapai target akhir Renstra

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

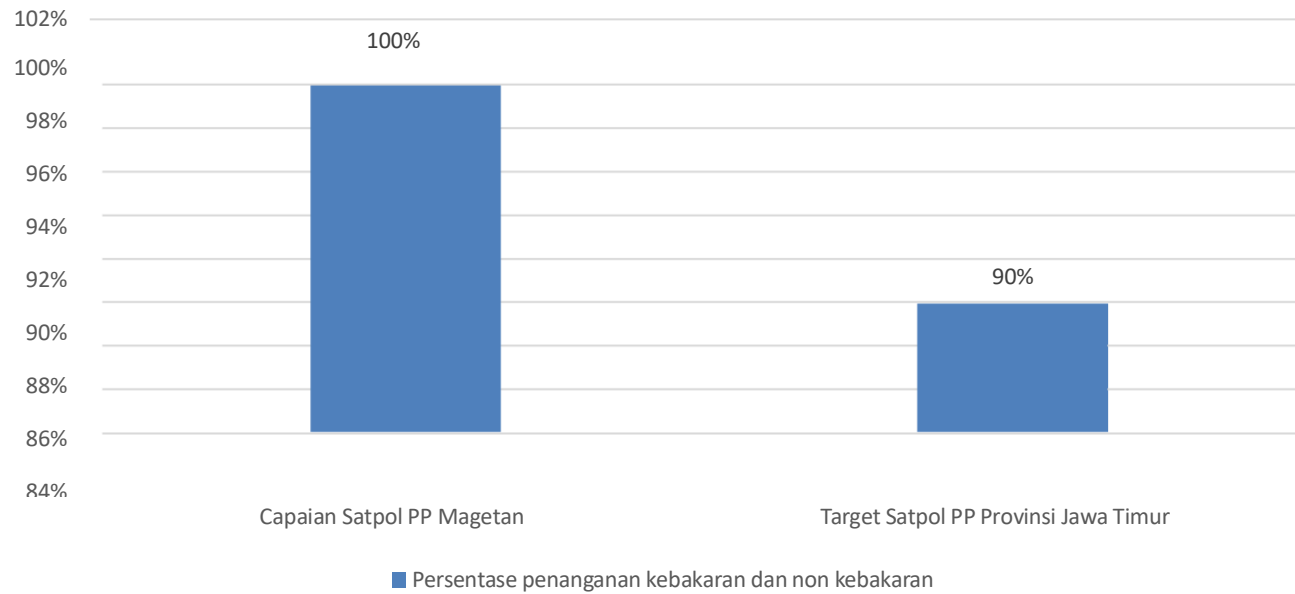
Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Target Satpol PP Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Satpol PP Provinsi Jawa Timur	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	100 %	90%	90%

Pada table diatas terdapat indikator kinerja Satpol PP Provinsi Jawa timur yang relevan dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan yakni persentase penanganan kebakaran dan non kebakaraan, dalam hal penanganan aduan kejadian kebakaran dan non Kebakaran, Satpol PP dan Damkar sudah berhasil menangani semua kejadian kebakaran dan non kebakaran dengan capain kinerja 100%, artinya capaian kinerja Satpol PP Magetan sudah melampaui target dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah tampilan dalam bentuk grafik batang.

Perbandingan Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar Magetan dengan Target Satpol PP Provinsi Jawa Timur



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.8

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	Tersedianya media yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan gangguan trantibum serta pelanggaran perda
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82	86	105%	tersedianya media pelaporan yang memudahkan petugas maupun masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran dan mencari lokasi kejadiannya lokasi kejadian kebakaran rata2 dekat dengan petugas sehingga masih dapat dijangkau sesuai respon time

3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79	94.54	102%	Diadakannya banyak asistensi terkait SAKIP dari Pemerintah Daerah menyebabkan penyusunan dokumen SAKIP menjadi lebih baik
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65	88.99	110%	adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam membuat aduan dan mendapatkan layanan dari Satpol PP dan Damkar

Dari tabel diatas disebutkan beberapa factor penyebab keberhasilan yang menunjang peningkatan masing-masing capaian target sasaran strategis, sedangkan untuk indikator sasaran no 2 terdapat kenaikan capaian dari tahun sebelumnya.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	Masih ada laporan yang disampaikan langsung melalui telepon atau wa kepada personal, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik	Akan dilakukan sosialisasi lebih massive terkait tata cara pengaduan kepada masyarakat agar semua dapat melalui pengaduan online, dan untuk tahun 2026 akan dilakukan pendataan untuk laporan yang melalui telepon atau wa yang masuk kepada personal Satpol PP
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi kejadian kebakaran tidak dapat diprediksi dan seringkali susah untuk mencari lokasi kejadian dengan akurat b. Untuk lokasi kejadian yang jauh dari mako damkar sangat sulit untuk mencapai SPM 15 menit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan posko pemadam kebakaran di Kecamatan Parang dan kawedanan serta mendorong pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa untuk setidaknya memiliki sarana prasarana pemadaman kebakaran ringan di wilayahnya masing-masing b. Menambah metode pengaduan/laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang sebelumnya hanya via telepon, ditambah menggunakan WA dan

				<p>menunjukkan lokasi kejadian kebakaran dengan share lokasi</p> <p>c. Memberikan edukasi kepada masyarakat desa, kelurahan maupun dinas instansi tentang pengetahuan cara pemadaman kebakaran dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran diwilayahnya. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan serta menanggulangi kebakaran ringan dan apabila terjadi kebakaran besar, masyarakat tahu kemana dan bagaimana cara melapor yang benar.</p>
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	Masih adanya data dukung kinerja yang belum terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat menghambat penyusunan laporan kinerja	Akan dilakukan sosialisasi terkait SAKIP kepada masing-masing bidang pengampu dan meningkatkan kualitas dokumentasi data dukung pada tahun 2026
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	Masih kurangnya personil dan sarana prasarana pendukung untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat	Akan dilakukan penambahan petugas maupun sarana prasarana pendukung pelayanan pada tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat permasalahan/hambatan yang terjadi dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja serta solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Hambatan yang paling banyak terjadi adalah pada indikator sasaran no 2 yakni terkait pemadaman kebakaran Penerapan solusi pada 2026 harapannya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.9
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	100	4.639.671.515	Menunjang

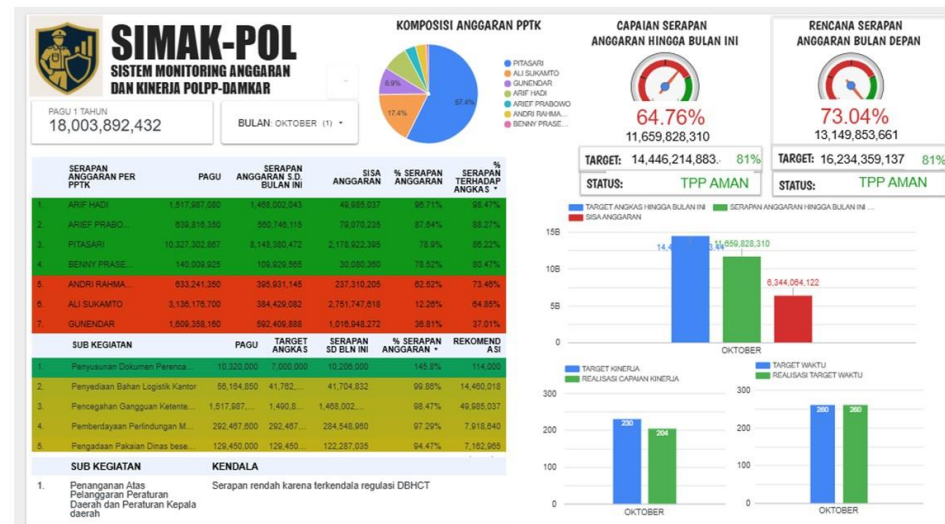
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	105%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	105%	806.176.700	Menunjang
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	94.54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	102%	10.788.510.922	Menunjang
	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	88.99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	110%		

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program yang merupakan program yang menunjang capaian kinerja

B. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah SIMAK-POL Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Satpol PP Damkar. SIMAK-POL adalah system yang memadukan antara kertas kerja monev dengan dashboard digital sehingga memudahkan monev anggaran dan kinerja pada Satpol PP dan Damkar



C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Adalah mendapatkan juara terbaik 4 dalam kategori pelayanan pengaduan SP4N LAPOR! dan Wani bares terbaik pada ajang Media Awards 2025



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Bupati Magetan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (Satu) tujuan, 3 (Tiga) sasaran dengan menggunakan 4 (Empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 4 (Empat) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja telah mencapai target
- Sasaran ke-1 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil);
- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 90 % (kategori berhasil);

Sasaran 2: Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105 % (kategori sangat berhasil);

- Sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja telah mencapai target
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (Satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105 % ((kategori sangat berhasil);
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 131 % ((kategori sangat berhasil

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN Kinerja %
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	82%	86%	105%
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	angka	92.79	94.54	102%
		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	angka	80.65	88.99	110%
CAPAIAN KINERJA						105%
						Sangat Baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah/belum mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 105% dengan serapan anggaran sebesar Rp 14.837.870.906 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 9 %.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 5%. Capaian kinerja pemadam kebakaran yakni Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit, tahun 2024 sebanyak 81% sedangkan tahun 2025 sebanyak 86%. Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 1.15%.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum	Melakukan patroli, penertiban, pengamanan pembinaan dan sosialisasi terkait perda maupun perkara kepada masyarakat secara lebih masive
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	Mengaktifkan posko pemadam kebakaran di parang dan kawedanan untuk memperpendek jarak tempuh Melaksanakan pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran yang baru untuk meningkatkan skill dan kesiapsiagaan

Atas rencana aksi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN n+1				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban	100	100	100	100	100

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100	100
	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit				86.5	86.5
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar				94,55	94,55
	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar				89	89

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN



LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra terakhir
- B. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- C. Matriks Renja Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya
- E. Pengukuran Kinerja
- F. Pohon Kinerja

**MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 – 2026**

No	Tujuan	3	Sasaran	5	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah				Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas	90%	90%	90%
		1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun	80%	80%	80%
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	1.3.1	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	92,78	92,79	92,80
				1.3.2	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	80	80,1	80,2

MATRIKS PERUBAHAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	3	SASARAN	5	INDIKATOR TUJUAN/SASAR	TARGET		
						RENJ A 7	P RENI 8	AKHIR RENSTR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah				Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas	90 %	90 %	90 %
		1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	82%	82%	80%
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	1.3.1	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	92,79 angka	92,79 angka	92,78 angka
				1.3.2	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	80.65 angka	80.65 angka	80 angka

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025-2029

- a. **Visi**
Magetan Nyaman Maju dan Berkelanjutan
- b. **Misi**
Membangun Kehidupan Masyarakat yang "Guyub Rukun", Aman, Tenteram, Berasaskan Nilai Agama dan Budaya Serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau Tugas
- c. **Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:**
 1. Menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
 2. Memelihara dan menyelenggarakan kentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran
- d. **Fungsi**
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), PPNS dan/atau aparaturnya
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
 - h. Pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - j. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentrman lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

		Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	Jumlah laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit $\times 100\%$ Jumlah laporan yang diterima	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan ; - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja; - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja; - Bobot 25 komponen evaluasi. <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, 	Inspektorat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

			<p>dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam 		
--	--	--	--	--	--

			<p>mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika; 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap; 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan; 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya. <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP; 2. Keselarasan dokumen perencanaan; 3. Ketercapaian Kinerja; 4. LHE ditindaklanjuti; 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE. <p>LKJIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>		
--	--	--	---	--	--

	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
--	--	---	--	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN MAGETAN

RUDY HARSONO, S. Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681201 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Tripandita No. 17 Magetan Kodepos 63314
Telepon (0351) 8198139 / 895513

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN P-APBD TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY HARSONO. S. Sos.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Jabatan : BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 21 November 2025



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.



RUDY HARSONO. S.Sos.

Revisi Nama Muda
NIP. 19881201 198903 1 013

Pohon Kinerja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
RPD (2024 - 2026)

